



Peta Koalisi Partai Politik di Indonesia pada Pemilihan Presiden Era Reformasi

Map of the Political Party Coalition in Indonesia Presidential Election in the Reform Era

Esty Ekawati

Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Indonesia

Diterima: 26 Juni 2019; Disetujui: 25 Agustus 2019; Dipublikasikan: 01 Desember 2019

Abstrak

Reformasi menjadi momen penting demokratisasi di Indonesia. Dua diantara perubahan penting di bidang politik yang terjadi pada era reformasi yakni kebebasan mendirikan partai politik dan perubahan sistem pemilu. Perubahan tersebut berdampak pada munculnya koalisi dalam dinamika politik di Indonesia, karena pemilihan umum yang dipadukan dengan sistem multipartai tidak mampu menghasilkan suara mayoritas di parlemen. Tulisan ini bertujuan untuk memetakan dan menganalisis dinamika koalisi partai-partai politik di Indonesia pada pemilihan presiden dan wakil presiden era reformasi dengan menggunakan teori-teori koalisi Riker, Katz&Mair dan Swaan. Dengan Melalui menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data sekunderdata sekunder yang diperoleh dari pemberitaan media dan literatur, maka ditemukan faktor utama yang memengaruhi terbentuknya koalisi pada pemilihan presiden dan wakil presiden era reformasi. Faktor tersebut adalah pragmatisme politik yang membuat partai politik menjadi partai kartel. Dalam hal ini partai menjadi agen negara dan memanfaatkan sumber daya negara untuk menjaga kelangsungan hidup partai. Pragmatisme inilah yang pada akhirnya menjadikan ideologi bukanlah faktor pengikat dalam membangun sebuah koalisi, namun hanyalah untuk memaksimalkan kekuasaan.

Kata Kunci: Pemilu, Partai Politik, Koalisi, Pragmatisme

Abstract

Reformation became an important moment of democratization in Indonesia. The two important political changes that occur in reformation era are the freedom to establish political parties and the electoral system. Such changes have an impact on the emergence of a coalition phenomenon in Indonesia, because general elections with multiparty systems are unable to produce a majority vote in parliament. This paper aims to map and analyze the dynamic of the political party coalition in Indonesia' presidential election in the reform era within coalition theories by Riker, Katz&Mair and Swaan. Using a qualitative approach and secondary data from media and literature, the main factor that influence the formation of coalitions in the presidential elections in the reform era is political pragmatism. It Political pragmatism makes political partiesparty politics as a cartel party that becomes the agent of the state and employ the resources of the state to ensure their party' survival. Pragmatism ultimately makes the ideology is not a binding factor in building a coalition, but simply to maximize power.

Keywords: Election, Political Party, Coalition, Pragmatism

How to Cite: Ekawati, E. (2019) Peta Koalisi Partai Politik di Indonesia pada Pemilihan Presiden Era Reformasi. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 7 (2): 160-172.

*Corresponding author:
E-mail: esti1wati@gmail.com

ISSN 2549-1660 (Print)
ISSN 2550-1305 (Online)

PENDAHULUAN

Euforia politik pasca reformasi ditunjukkan dengan kebebasan masyarakat mendirikan munculnya partai politik di Indonesia. Kondisi ini dapat kita saksikan dilihat menjelang pemilihan umum tahun 1999 di mana terjadi ledakan partisipasi politik masyarakat melalui pembentukan partai politik. Setidaknya ada 123 partai politik yang terbentuk pada Desember 1998, dan ada 20 partai politik berlabel Islam dan ada sekitar 30 partai politik yang dengan tegas menjadikan komunitas Muslim sebagai basis atau target massa mereka (Fattah, 2000). Pada akhirnya, dari sekian banyak partai politik yang mendaftar, hanya 48 partai politik yang bisa ikut dalam Pemilu 1999. Kondisi kebebasan berpartisipasi ini menjadikan partai-partai politik mengembangkan platform ataupun ideologi sebagai identitas pembeda antara satu partai dengan yang lain. Hal ini penting demi meraih dukungan publik dalam pemilu baik pemilu legislatif maupun pemilihan presiden dan / wakil presiden.

Seperti yang kita tahu bahwa sistem kepartaian di Indonesia era reformasi tergolong pada sistem multipartai yang memiliki jumlah partai sangat banyak dan memiliki rentang ideologi formal yang tajam serta cenderung bergerak secara sentrifugal yang berpotensi melahirkan perpecahan menjadi partai-partai baru (Yuda, 2010). Dalam kondisi sistem kepartaian yang multipartai, koalisi politik merupakan sebuah keharusan bagi parpol partai politik manapun. Ini sejalan dengan Downisian yang menyajikan perkembangan pendekatan kompetisi partai dalam kerangka demokrasi multipartai menyatakan bahwa partai-partai yang ada tidak pernah mampu membentuk pemerintahan sendiri sehingga membutuhkan koalisi (Giannetti & Benoit, 2009).

Koalisi menjadi tak terhindarkan dikarenakan, pertama, tidak ada kekuatan

politik yang memperoleh suara mutlak bila dibandingkan dengan gabungan partai-partai lain, kedua, koalisi politik menekankan adanya satu persamaan tujuan atau persepsi, juga kedekatan ideologis, ketiga, pemilu dengan sistem multipartai mengisyaratkan adanya pola politik posisi kontra oposisi sehingga koalisi politik tidak bisa dihindarkan (Noer, 1999).

Dalam konteks Indonesia pasca Orde Baru, koalisi merupakan keniscayaan dilakukan akibat pilihan sistem kepartaian yang multipartai. Ketidakmampuan partai politik mendapat suara mayoritas dalam pemilu legislatif menyebabkan koalisi membentuk pemerintahan adalah jalan yang harus ditempuh. Kenyataan inilah yang terjadi di Indonesia pada pemilihan presiden dan wakil presiden pasca Orde Baru meskipun dalam pemilihan presiden/wakil presiden agak berbeda pada tahun 1999 dan 2019. Artikel ini membahas mengenai dinamika dan peta koalisi partai –partai politik di Indonesia pada pemilihan presiden pasca Orde Baru (1999-2019).

Koalisi merupakan aktivitas politik yang kerap terjadi di negara dengan sistem multipartai, tak terkecuali di Indonesia pasca Orde Baru. Tulisan ini memahami perilaku koalisi partai politik sebagai bagian dalam membangun pemerintahan yang didasarkan pada motif atau tujuan tertentu. Seperti yang diungkapkan para ahli bahwa partai politik merupakan wadah bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam politik jika rakyat ingin menjadi anggota legislatif maupun jabatan-jabatan politik lainnya. Giovanni Sartori mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum tersebut partai politik dapat menempatkan calon-calonnya untuk mengisi jabatan-jabatan publik (Sartori, 2005).

Bagi negara dengan sistem multipartai, hasil pemilu kerap

menunjukkan konfigurasi suara yang tidak mampu memenuhi suara mayoritas untuk bisa membentuk pemerintahan sendiri, karenanya. Oleh karenanya, diperlukan koalisi partai politik untuk membentuk pemerintahan dan juga koalisi di parlemen terkait pengambilan keputusan tertentu. Koalisi pemerintahan diperlukan selain untuk memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu juga untuk mengisi jabatan-jabatan kabinet sebagai agen pemerintah dan aparatus negara/birokrasi (Cross & Katz, 2013).

Dalam tulisan ini akan digunakan teori koalisi yang dikenalkan oleh William Riker (1962). Riker dikenal sebagai pelopor teori koalisi yang memperkenalkan teori Minimal-Winning Coalitions (MWC). Menurutnya, pemerintahan seharusnya dibentuk dengan koalisi yang menjamin kemenangan minimum. Yang menjadi asumsi dasar dari MWC antara lain: 1) Partai politik berkepentingan untuk memaksimalkan kekuasaan yang mereka miliki, baik dalam kabinet maupun parlemen, 2) MWC memerlukan jumlah kursi tertentu untuk mencapai kemenangan yang minimal (yakni 50%+1) di parlemen, 3) MWC sebenarnya membutuhkan koalisi dua atau lebih partai yang dapat mengontrol kursi parlemen, tetapi minimal dalam arti mereka tidak memasukkan partai yang tidak perlu untuk mencapai kemenangan (Wardani, 2006). Dalam teori ini, koalisi ini hanya cukup memiliki mayoritas minimal kursi parlemen tanpa perlu melibatkan partai-partai yang memiliki kursi kecil dalam koalisinya. Adapun tujuan atau motif terjadinya koalisi ini yakni apa yang disebut oleh Strom yakni office-seeking atau memaksimalkan kekuasaan (Strom, 1990).

Adapun teori koalisi yang berorientasi pada kebijakan dikenalkan oleh Abraham De Swaan (1973) yang menekankan betapa pentingnya ideologi

partai dalam pembentukan koalisi (Strom, 1990). Dalam teori ini, mendapatkan kekuasaan di pemerintahan bukanlah tujuan akhir dari politisi partai, namun merupakan sarana untuk menjalankan program ideologis dan menerapkan kebijakan yang didasarkan pada ideologi. Oleh karena itu, Dalam konteks tersebut, koalisi dapat dilakukan oleh partai-partai yang memiliki ideologi kurang lebih sama. Kedua teori yang telah disebutkan di atas berbeda dengan teori yang dikenalkan oleh Katz dan Mair (1995) yang menyatakan bahwa semua partai besar memiliki kepentingan yang sama, yakni memelihara kelangsungan hidup kolektif mereka.

Demokratisasi memiliki dampak yang kemudian dikenal dengan sebutan partai kartel (*cartel party*) (Katz & Mair, 1995), di mana partai politik menjadi agen negara dan menggunakan sumber daya milik negara untuk memenuhi kepentingan kolektif partai dengan melepaskan berbagai perbedaan ideologis dan programatis mereka demi kepentingan tertentu (Ambardi, 2009). Teori-teori mengenai koalisi tersebut yang digunakan penulis untuk melihat kecenderungan partai-partai di Indonesia dalam membangun koalisi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif. Penulis mengumpulkan data dan informasi dalam upaya menemukan pola atas realitas atau gejala yang dikaji. Menurut Neuwman, melalui metode kualitatif maka akan dapat disajikan sebuah gambaran dari sebuah situasi yang diteliti secara lebih terperinci (Neuwman, 2013). Penelitian ini bertipe deskriptif analitis. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui sumber sekunder yakni buku, jurnal, dokumen dan sumber *online*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menilik sejarah pemilu di Indonesia pada rezim Orde Baru maka Pemilu tahun

1999 dapat dikatakan sebagai pemilu demokratis pertama pasca reformasi. Dari hasil pemilu 1999 nyatanya menunjukkan konfigurasi perolehan suara yang mengejutkan, di mana Golkar yang selama enam kali memenangkan pemilu pada rezim Soeharto harus menyaksikan kemenangan partai rival-nya yaitu PDI-Perjuangan (semasa Ode Baru namanya Partai Demokrasi Indonesia- PDI). Meski PDI -Perjuangan tercatat sebagai partai pemenang pemilu legislatif tahun 1999 namun kemenangan ini tidak memberikan jaminan Ketua Umum-nya yakni Megawati Soekarno Putri otomatis menjadi presiden. Hal ini disebabkan belum adanya aturan kelembagaan yang mengatur bahwa partai pemenang pemilu-lah yang berhak menjadi presiden. Momen inilah yang dimanfaatkan oleh sejumlah elit dalam membangun strategi menghadang Megawati Soekarno Putri sebagai calon presiden.

Salah satu maneuver yang dilakukan oleh elit-elit politik pada masa itu yakni memunculkan nama Amien Rais sebagai calon presiden mewakili koalisi partai-partai Islam yang kemudian disebut sebagai Koalisi Poros Tengah. Namun, nyatanya Amien Rais saat itu tidak berkenan dicalonkan menjadi capres menjadi calon presiden (selanjutnya akan disebut capres) sehingga muncullah nama Abdurrahman Wahid (yang selanjutnya disebut Gus Dur) sebagai calon presiden mewakili Poros Tengah untuk berkontestasi berhadapan dengan Megawati yang diusung oleh PDI Perjuangan. Adapun masa itu, pemilihan presiden dan wakil presiden masih sama dengan pemilu sebelumnya yakni melalui Sidang Istimewa MPR. Berdasarkan Sidang Istimewa MPR yang dilakukan secara tertutup maka Gus Dur-lah yang akhirnya terpilih menjadi presiden. Gus Dur mendapatkan dukungan sebanyak 373 suara, sedangkan Megawati memperoleh dukungan sebanyak 313 suara. Atas dasar perolehan suara tersebut maka diputuskan

Gus Dur sebagai Presiden RI (Ekawati, 2015).

Amin Rais yang saat itu menduduki posisi sebagai Ketua MPR dan Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR sangat strategis dalam menghimpun suara di parlemen dalam pemilihan presiden maupun wakil presiden. Meskipun PDI -Perjuangan sebagai pemenang pemilu, namun hitung-hitungan jumlah suara kursi PDI Perjuangan di parlemen masih kalah dari suara jumlah kursi gabungan partai-partai lainnya. Strategi penghadangan Megawati melalui Koalisi Poros Tengah (PAN, PPP, PKB) menjadi contoh bagaimana identitas Islam dimanfaatkan dalam memobilisasi dukungan.

Apa yang terjadi pada pemilu 1999 tidak hanya menarik untuk melihat bagaimana pemilihan presiden berlangsung, namun juga pemilihan wakil presiden dilaksanakan secara terpisah. Megawati yang mengalami kekalahan dalam pemilihan presiden melawan Gusdur kemudian maju lagi dalam kontestasi pemilihan wakil presiden yang dilaksanakan secara terpisah, justru menang melawan Hamzah Haz. Megawati mampu mengalahkan Hamzah Haz dengan perolehan suara 396 suara untuk Megawati dan 284 bagi Hamzah (Tempo, 2015). Padahal Hamzah Haz dikenal sebagai tokoh yang mewakili suara Islam, namun tidak cukup kuat melawan Megawati. Kemenangan koalisi poros tengah (Partai Islam) dalam mengusung Gusdur tidak terjadi dalam pemilihan wakil presidennya.

Kekalahan Hamzah Haz dalam kontestasi pemilihan wakil presiden tidak serta merta persoalan kurangnya dukungan politik. Poros Tengah dan Golkar bisa memaksakan calon wakil presidennya bukan Megawati, melainkan Hamzah Haz, atau Susilo Bambang Yudoyono dari ABRI yang juga mencoba peruntungannya dalam memperebutkan kursi wapres (Mujani dkk, 2011). Namun,

dinamika yang terjadi pasca terpilihnya Gusdur sebagai Presiden tahun 1999 menimbulkan kegaduhan politik di akar rumput terutama simpatisan PDI Perjuangan yang merasa menang dalam pemilu legislatif justru kalah dalam pemungutan suara dalam Sidang Istimewa MPR. Berbagai demonstrasi dan kerusuhan terjadi di beberapa daerah seperti di Bali, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan Riau karena masyarakat kecewa dan marah akibat kekalahan Megawati. Apa yang terjadi sebagai upaya peredaman dan juga menjaga kondusifitas di akar rumput berujung pada hasil votting dalam Sidang MPR-RI di mana Megawati akhirnya terpilih sebagai wakil presiden mendampingi Gusdur. Mujani dkk (2011) menyebutkan bahwa terpilihnya Gusdur sebagai Presiden dan Megawati sebagai wakilnya adalah fakta bahwa demokrasi bukannya sistem yang sempurna untuk memilih pemimpin, namun cara yang paling mungkin untuk menengahi pertarungan dan konflik elite politik yang terjadi saat itu.

Bulan madu politik koalisi Koalisi Poros Tengah dalam perjalanannya bukan tidak mengalami dinamika. Pada Kongres I PAN di Yogyakarta bulan Februari 2000, Sebelum Sidang Istimewa MPR digelar pada tahun 2001, PAN memutuskan mencabut dukungan kepada Gusdur., DPP PAN menilai, kepemimpinan nasional sudah menjadi masalah sentral dan kondisi tersebut tidak mungkin dapat diperbaiki tanpa melakukan rekonstruksi kepemimpinan nasional (www.liputan6.com, 2001). karena PAN merasa prihatin terhadap kondisi bangsa dan negara yang terpuruk hampir disegala bidang (Litbang Kompas). Berbagai Berbagai maneuver politik terjadi pada tahun-tahunera pemerintahan Gusdur yang pada akhirnya berujung pada impeachment pemakzulan Gusdur sebagai presiden melalui Sidang Istimewa MPR. Akibat dari berkurangnya dukungan parlemen terhadap Gusdur maka padadan

kemudian pada akhirnya 23 Juli 2001 dilakukan Sidang Istimewa MPR yang mengesahkan pemberhentian Gusdur sebagai presiden dan digantikan oleh Megawati Soekarno Putri digantikan oleh Megawati (LIPI, 2004).

Sistem Pemilu 2004 mengalami perubahan di mana pada pemilu ini selain memilih anggota legislatif, rakyat juga memilih presiden dan wakil presiden secara langsung (tanpa melalui Sidang Istimewa MPR seperti pada pemilu sebelumnya). Meski dilakukan bersamaan namun, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan terpisah, tepatnya setelah pemilihan legislatif dilakukan. Hal ini memungkinkan perlunya membangun koalisi partai politik untuk mengusung capres dan cawapres. Karena sistem pemilihan presiden dilakukan secara langsung maka pada pemilu 2004 ini jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mengikuti kontestasi mengalami peningkatan.

Amien Rais, tokoh yang awalnya dicalonkan menjadi presiden tahun 1999 namun tidak bergeming, justru memilih untuk maju dalam pemilu presiden 2004 padahal di saat yang sama, perolehan suara PAN mengalami penurunan dibanding tahun 1999. Karena suara PAN mengalami penurunan dukungan politik maka Amien Rais sebagai kader Muhammadiyah mulai meminta dukungan dari Ormas tersebut. Bak gayung bersambut, dukungan tersebut diungkapkan oleh Muhammadiyah terepresentasi dari pernyataan Haedar Nasir, bahwa Amien Rais adalah kader terbaik Muhammadiyah meskipun dukungan ini nyatanya menabrak tradisi Muhammadiyah yang tidak ingin masuk dalam politik praktis (Mujani dkk, 2011).

Akibat sistem pemilihan umum yang berbeda maka dinamika koalisi pada Pemilu 2004 mengalami perubahan. Peta politik partai-partai Islam mengalami pergeseran kecenderungan pilihan koalisi yakni tidak lagi berbasis partai Islam

namun justru mulai melirik untuk berkoalisi dengan partai nasionalis. Pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2004 pada putaran pertama diikuti oleh lima pasangan calon (paslon). Partai Golkar mencalonkan Wiranto, kemudian Megawati Soekarno Putri yang dicalonkan oleh PDI Perjuangan, kemudian ada Amien Rais yang mendapat dukungan dari PAN, PBR dan PKS, sedangkan Hamzah Haz mendapat dukungan dari PPP. Adapun Partai Demokrat dan PBB memberikan dukungan kepada Susilo Bambang Yudoyono yang berpasangan dengan Jusuf Kalla. Akibat banyaknya paslon yang mengikuti pemilihan presiden, maka pada putaran pertama tidak ada paslon yang mampu memenuhi ambang batas minimal capres. Akibatnya, mesti dilakukan pemilihan putaran kedua. Pemilihan presiden putaran kedua mempertemukan pasangan Susilo Bambang Yudoyono-Jusuf Kalla melawan Megawati Soekarno Putri-Hasyim Muzadi. Hasilnya, pasangan Susilo Bambang Yudoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK) memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2004.

Melihat peta koalisi yang dipaparkandalam table di bawah ini, dapat dilihat bahwa masing-masing partai seperti PDI Perjuangan, PAN, PKB dan Partai Demokrat mencalonkan figur-figur yang diyakini dapat memenangkan pemilihan karena mereka merupakan tokoh yang populer di masyarakat. Amien Rais dikenal sebagai tokoh reformasi, Megawati merupakan putri dari Presiden Soekarno, Gusdur adalah tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang kharismatik dan SBY adalah sosok politikus meskipun baru namun namanya cukup populer di masa itu. Mereka menjadi capres tanpa melalui proses seleksi di internal partai yang sifatnya terbuka. Inilah yang membedakan dengan partai Golkar yang melakukan konvensi di internal partai untuk memilih calon presidennya (Budiatri, 2018).

Tabel 1
Peta Koalisi Partai Politik Pada Pilpres 2004

No Urut	Putaran 1	Hasil (%)	Partai Pendukung	Putaran 2	Hasil (%)
1	Wiranto – Salahudin Wahid	22,19	Golkar, PKB ¹		
2	Megawati – Hasyim Muzadi	26,24	PDIP, PDS	Megawati – Hasyim Muzadi	39,38
3	Amien Rais – Siswono Yudo Husodo	14,94	PAN, PBR, PKS, PNBK, PSI		
4	Susilo Bambang Yudoyono – Jusuf Kalla	33,58	Partai Demokrat, PBB, PKPI	Susilo Bambang Yudoyono – Jusuf Kalla	60,62
5	Hamzah Haz Agum Gumelar	3,05	PPP		

Sumber: Mujani et al, 2011

Perubahan peta koalisi partai-partai Islam di pemilu 2004 tentunya bukan semata persoalan ideologis, namun juga pragmatis. Partai-partai Islam yang awalnya terfragmentasi saat pilpres putaran pertama, justru mulai merapat di kedua kubu capres pada putaran kedua. PPP dan PKB memilih berkoalisi dengan partai pengusung Megawati – Hasyim Muzadi, sedangkan PAN dan PKS memilih untuk berkoalisi dengan pasangan Susilo Bambang Yudoyono – Jusuf Kalla. Jika menilik lebih jauh perubahan peta koalisi baik partai Islam maupun nasionalis ini dikarenakan salah satunya adalah upaya mendekatkan diri dengan calon yang memiliki potensi besar menang, karena bagaimana-pun partai membutuhkan sumber daya untuk menjaga kelangsungan partai (office seeking dan rent seeking). Hal ini kemudian terbukti dengan pilihan formasi kabinet yang dibangun oleh rezim

¹ Pada pemilihan presiden tahun 2004, PKB awalnya mencalonkan Gusdur sebagai capres berpasangan dengan Marwah Daud, namun setelah melalui proses pendaftaran pasangan ini tidak lolos tes kesehatan sehingga batal menjadi pasangan calon.

SBY-JK yang kemudian dikenal publik sebagai kabinet pelangi. Disebut dengan kabinet pelangi karena kursi menteri separuhnya diduduki oleh perwakilan partai politik pendukung pemerintah.

Pemilu tahun 2009 yang juga mengalami perubahan sistem yakni penghitungan suara pemenang legislatif dilakukan berdasarkan suara terbanyak maka berpengaruh terhadap peta politik koalisi parpol. Partai Demokrat yang pada pemilu 2004 tidak mendapatkan suara yang signifikan, namun mampu menempatkan SBY sebagai presiden mendapatkan keuntungan pada pemilu 2009. Di periode pemilu 2009, berkat kinerja di masa sebelumnya dan ketokohan seorang SBY, ia mampu membawa partai Demokrat tampil sebagai pemenang/ pperaih suara terbanyak pada pemilu legislatif. Sehingga, pada pemilihan presiden dan wakil presiden, Hal tersebut berdampak positif terhadap posisi SBY pada saat pemilihan presiden berlangsung di mana ia tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh dukungan publik.

Tabel 2

Peta Koalisi Partai politik Pada Pilpres 2009			
No	Pasangan	Hasil (%)	Partai pendukung
1	Megawati - Prabowo	26,79	PDIP, Gerindra
2	SBY - Boediono	60,80	Demokrat, PPP, PKB, PKS, PAN
3	JK - Wiranto	12,41	Golkar, Hanura

Sumber: Mujani et al, 2011

Pada pemilihan presiden tahun 2009, Susilo Bambang Yudoyono yang berpasangan dengan Boediono selain didukung oleh partai Demokrat, juga mendapat dukungan dari partai Islam yakni PKB, PAN, PKS dan PPP. Sedangkan pasangan Megawati-Prabowo didukung oleh PDIP dan Gerindra. Seperti yang kita tahu bahwa Gerindra merupakan partai baru yang muncul di pemilu 2009 dan diketuai dipimpin oleh Prabowo Subianto setelah ia keluar dari partai Golkar. Adapun Jusuf Kalla kali ini mencoba peruntungannya untuk maju menjadi calon

presiden yang berdampingan dengan Wiranto dan diusung oleh partai Golkar dan Hanura. Wiranto merupakan pendiri dan Ketua Umum Partai Hanura.

Melihat nama-nama capres seperti Prabowo, SBY, Wiranto yang nota bene mereka adalah tokoh-tokoh yang muncul dengan partai barunya menunjukkan bahwa betapa sentralnya mereka dalam partai. Dengan ketokohan yang kuat diharapkan soliditas partai akan terbangun sehingga bekerja keras meraih dukungan publik memenangkan capresnya. Di lain sisi, komposisi peta dukungan partai-partai Islam kepada pasangan SBY-Boediono pun pada akhirnya menimbulkan asumsi publik bahwa membangun koalisi dengan partai pemerintah memberikan keuntungan bagi partai terutama dalam kaitannya dengan mempertahankan sumber daya. Lagi-lagi Komposisi kabinet SBY-Boediono tidak berbeda dari kabinet sebelumnya yakni kabinet pelangi yang diisi oleh koalisi partai politik pendukung pemerintah. Praktik koalisi yang melibatkan banyak partai politik di Indonesia dikenal dengan istilah koalisi turah (*oversized coalition*). Koalisi turah ini bukan tanpa tujuan. Bagi partai pendukung pemerintah termasuk partai Islam, koalisi bertujuan untuk menjaga kelangsungan kolektif partai seperti yang diungkapkan oleh Katz & Mair (1995) bahwa partai politik menjadi agen negara dan menggunakan sumber daya milik negara untuk memenuhi kepentingan kolektif partai. Partai membangun koalisi demi memaksimalkan kekuasaan atau yang disebut Riker (1962) sebagai *office-seeking*. Sedangkan bagi partai pemerintah dalam hal ini Partai Demokrat, *oversized coalition* menjadi kekuatan melawan oposisi di parlemen dalam hal pengambilan keputusan.

Dinamika politik di Indonesia menarik untuk dikaji karena pemilu kerap menghadirkan volatilitas suara partai-partai politik. Volatilitas suara perolehan

partai terutama partai Islam-lah yang paling kentara seperti dapat dilihat dalam tabel berikut;

Tabel 3
Prosentase Perolehan Suara Partai Islam (dalam persen)

Partai	Pemilu 1999	Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014
PKB	12,61	10,61	4,95	9,04
PKS	1,36	7,20	7,89	6,79
	(pada Pemilu 1999 bernama Partai Keadilan)			
PAN	7,12	6,41	6,03	7,57
PPP	10,71	8,16	5,33	6,53
PBB	1,94	2,62	Tidak lolos ambang batas	Tidak lolos ambang batas
PBR	-	2,60	-	-

Sumber: data KPU. www.kpu.go.id

Pemilu 2014 kembali menghadirkan kemenangan PDI Perjuangan yang disusul oleh partai Golkar dan Gerindra. Ketiga partai besar ini memiliki calon yang digadang-gadang akanberpotensi maju sebagai calon presidencapres. Dari ketiga partai tersebut nama Joko Widodo, Aburizal Bakrie dan Prabowo Subianto diunggulkan sebagai calon presiden. Namun pada akhirnya, nama calon presiden mengerucut pada dua tokoh populer yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Berdasarkan hasil perolehan suara pada pemilihan legislatif 2014 seperti yang dapat dilihat dalam tabel 3, partai-partai Islam mampu memperoleh suara yang cukup signifikan. PKB merupakan salah satu partai yang mengalami peningkatan perolehan suara dibandingkan pada pemilu 2009. Begitu juga dengan PKS yang dalam perjalanannya tidak terlepas dari jeratan korupsi yang melanda pimpinan partai, namun loyalitas pemilih mampu mempertahankan perolehan suara partai tersebut. Peningkatan suara partai Islam itulah yang kemudian sempat

memunculkan romantisme masa lalu yakni wacana membentuk “Koalisi Poros Tengah”. Wacana Poros Tengah diantara elit partai Islam ternyata tidak mendapat satu suara. PKB merupakan salah satu partai yang pada tahun 1999 aktif dalam mewacanakan koalisi poros tengah, namun pada pemilu 2014 justru tidak menyetujui rencana pembentukan koalisi tersebut.

Pada Pilpres tahun 2014, PKB kemudian menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan. PPP dan PAN menjajaki koalisi dengan Gerindra, sementara PKS lebih mendekati ke Partai Golkar (www.csrc.or.id, 2014). Munculnya tiga poros koalisi ini didasarkan pada suara partai-partai yang memiliki kekuatan tiga besar pada pemilu legislatif 2014 yakni PDI Perjuangan, Golkar dan Gerindra. Namun, dalam perjalanan lobi politik menjelang pilpres, akhirnya hanya ada dua poros koalisi yang terbentuk dan kemudian menjadi paslon yang maju dalam Pilpres 2014 seperti dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4
Peta Koalisi Partai politik pada Pilpres 2014

No	Pasangan	Hasil (%)	Partai Pendukung
1	Prabowo - Hatta	46,85	Gerindra, PPP, PKS, PAN, Golkar
2	Jokowi - JK	53,15	PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, PKPI

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Menilik konstelasi politik yang terjadi dari pemilu ke pemilu maka pilpres tahun 2014 dapat dikatakan berbeda dengan pemilu sebelumnya. Salah satunya bisa dilihat dari maneuver politik PDI Perjuangan yang tidak lagi mencalonkan tokoh sentralnya yakni Megawati namun justru mencalonkan Joko Widodo. Jokowi – biasa disebut- merupakan sosok populer di masyarakat karena kiprahnya sebagai walikota Solo dan Gubernur Jakarta.

Pasangan capres dan/cawapres nomor urut pertama yakni pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa didukung oleh Gerindra dan berkoalisi dengan PAN, PPP, PKS dan Golkar. Sedangkan pasangan

kedua yakni pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla didukung oleh PDI Perjuangan, PKB, Hanura, PKPI dan Nasdem. Kemenangan diraih oleh pasangan Jokowi-JK dengan perolehan suara sebesar 53,15%.

Pada bagian koalisi tahun 2019 ini, penulis tidak akan membahas kemenangan paslon dan partai di tingkat legislatif karena sampai pada penulisan artikel ini, hasil real councititung cepat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum selesai. Bagian ini hanya akan menggambarkan dinamika pembentukan koalisi parpol menjelang pilpres 2019. Perubahan peta koalisi terjadi pada Partai Golkar dan PPP di mana pada pemilu 2014 mengusung pasangan Prabowo-Hatta namun pada pemilu 2019 berubah haluan koalisi dengan mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Pemilu 2019 merupakan pemilu yang berbeda sistemnya dari pemilu-pemilu sebelumnya di era reformasi. Pemilu 2019 dikenal dengan pemilu serentak lima kotak suara di mana pemilihan legislatif (DPR, DPRD Prov/kab/kota dan DPD) dilakukan berbarengan dengan pilpres. Karena memori pilpres 2014 nampaknya masih membekas dalam ingatan politik parpol maka pilpres 2019 yang tidak lagi menunggu hasil pemilu legislatif hanya memunculkan dua nama figure kuat yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Berkaca dari empat pemilu yang telah dibahas sebelumnya, koalisi 2019 cenderung memiliki pola yang sama dengan pemilu 2014. Selain hanya diikuti oleh dua pasang calon di mana calon presiden-nya masih sama, peta koalisi partai pengusungnya pun kecenderungannya sama. Kedua pasang calon tersebut adalah Joko Widodo - K.H Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Salahudin Uno. Ada sembilan parpol yang mengusung Jokowi-Ma'ruf Amin pada pemilu 2019 yakni PDI Perjuangan (18,95 %), Partai Golkar (14,75 %), PKB (9,04 %), PPP (6,53 %), NasDem (6,72 %), dan Hanura (5,26 %),

dengan total dukungan 61,25 % dan ditambah dukungan dua partai baru yakni Perindo dan PSI. Sedangkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno diusung oleh Gerindra (11,81 %), Demokrat (10,19 %), PAN (7,59 %), dan PKS (6,79 %), dengan total dukungan mencapai 36,38 %. Dari presentase dukungan tersebut dapat dilihat bahwa pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mendapat dukungan politik mayoritas (<https://nasional.tempo.co>, 2017).

Dinamika politik yang menarik terkait pilpres 2019 justru terjadi dalam proses pemilihan calon wakil presiden di kedua kubu (kubu Jokowi dan Prabowo). Pilihan capres Joko Widodo yang jatuh kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin untuk menjadi cawapres pendampingnya pada pilpres 2019, cukup mengejutkan. Hal ini dikarenakan nama cawapres yang ramai diperbincangkan adalah Mahfud MD. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu digadag-gadagmerupakan sebagai calon kuat kandidat kuat pendamping Jokowi yang bahkan sudah mengurus persyaratan cawapres. Namun, saat deklarasi justru nama Ma'ruf Amin yang dipilih Jokowi untuk menjadi cawapres (<nasional.tempo.co>, 2018).

Dari kubu Prabowo, terpilihnya Sandiaga Salahudin Uno sebagai cawapres baru muncul dua hari sebelum masa pendaftaran pasangan capres dan cawapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berakhir. Padahal dalam dinamika komunikasi politik yang terbangun sebelumnya, nama Sandiaga Uno tidak ada dalam bursa cawapres Prabowo. Tim pemenang Prabowo yang intensif berkomunikasi dengan partai-partai pendukungnya seperti Demokrat, PAN dan PKS justru memunculkan empat nama yang kerap dibahas bersama, yakni Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Majelis

Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, dan seorang tokoh agama yakni Ustaz Abdul Somad. Dalam proses lobi-lobi politik selanjutnya, kandidat kuat untuk menjadi cawapres Prabowo adalah AHY dan Salim karena Abdul Somad telah menolak untuk menjadi cawapres (nasional.kompas.com, 2018). Sehari sebelum pendaftaran pasangan capres dan /cawapres ke KPU ditutup, lobi-lobi antar partai di kubu Prabowo semakin intens. Pada akhirnya, muncul nama Sandiaga Uno ditetapkan sebagai cawapres Prabowo yang dibarengi dengan beredarnya isu mahar politik yang diberikan Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS (www.merdeka.com, 2018).

Sistem pemilihan presiden yang berbeda dalam pemilu-pemilu pasca Orde Baru tentu juga berpengaruh pada peta koalisi partai-partai pengusung. Jika kita lihat lagi, sistem pemilihan presiden tahun 1999 dilakukan melalui Sidang Istimewa MPR yang melibatkan sekitar 695 anggota, tentu secara hitungan politik lebih memudahkan dalam proses pencalonan hingga pemungutan suaranya. Demikian juga dengan dinamika politik yang terjadi hanyalah di kalangan elit-elit parpol saja. Namun, dinamika koalisi mengalami perubahan ketika sistem pemilu terutama pemilihan presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Tentu saja ini terkait dengan upaya mendulang dukungan suara dari akar rumput.

Dinamika koalisi partai politik di Indonesia merupakan suatu keniscayaan karena jika kita melihat pengalaman pemilu 2004 misalnya, tidak ada partai yang mampu mencapai suara mayoritas untuk mengusung capres-nya sendiri. Akibatnya koalisi antar parpol mesti dilakukan. Pemilu 2009 meskipun Partai Demokrat mampu mengusung calon presidennya sendiri namun hal tersebut tidak dilakukan. Alih-alih merampingkan koalisi, Demokrat justru membentuk koalisi turah (oversized coalition). Koalisi turah ini bukan tanpa alasan. Menurut penulis ada dua alasan merujuk pada teori-

teori koalisi yakni, pertama, partai politik membutuhkan dukungan sumber daya demi menjaga kelangsungan hidup partai seperti yang diungkapkan oleh Katz & Mair (1995). Kedua, partai utama pengusung membutuhkan dukungan kuat di parlemen/lembaga legislatif untuk menghadapi oposisi terutama dalam kaitannya pengambilan keputusan politik di parlemen.

Menarik juga untuk melihat koalisi partai Islam yang terjadi pada pemilihan presiden tahun 1999 dan 2014 (yang sempat memunculkan koalisi poros tengah), maka menurut Noer (1999), setidaknya ada dua hal yang menyebabkan terjadinya koalisi antar partai: 1) kedekatan ideologis yang sangat kuat untuk mempersatukan mereka dalam satu gugus politik. 2) persamaan kepentingan politik yang mesti diperjuangkan bersama-sama.

Adapun pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 dan 2019, koalisi parpol yang terbentuk lebih menajam seiring dengan munculnya politisasi agama dalam mencari dukungan politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan negara dengan penganut Muslim yang besar sehingga mendapatkan dukungan politik dari umat Islam adalah cara yang efektif. Tak ayal, pada kedua pemilu terakhir ini, isu politisasi identitas dan politisasi agama menjadi komoditas politik yang beredar di masyarakat. Terkait dengan isu politisasi agama dan identitas tersebut, Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2018 melakukan survey ahli yang hasilnya menyatakan bahwa salah satu kondisi politik yang berpotensi terjadi dan mengganggu jalannya pemilu 2019 adalah politisasi SARA dan identitas, seperti dapat dilihat dalam grafik berikut.



Grafik 1. Kondisi Politik yang Berpotensi Mengganggu Pemilu 2019

Sumber: Data Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI, 2018.

Berdasarkan grafik di atas, politisasi SARA dan identitas menempati urutan pertama problem politik menjelang pemilu 2019, diikuti dengan konflik antar pendukung calon, gangguan keamanan, persoalan penyelenggara pemilu dan juga politik uang. Konflik antara pendukung paslon juga bisa merupakan salah satu dampak dari adanya “pengerasan” atau “polarisasi” dukungan dari dua kubu dalam mengkapitalisasi isu agama dan identitas, sehingga beragam konflik yang terjadi bisa berubah menjadi gangguan keamanan di masyarakat menjelang pemilu 2019. Adapun politik uang, masih merupakan masalah klasik yang muncul di masyarakat dari pemilu ke pemilu. Hal ini dikarenakan sistem pemilu dengan suara terbanyak menghadirkan kompetisi “tarung bebas”. Semua caleg baik antar partai maupun caleg dalam satu partai-pun sama-sama berkompetisi dalam meraih dukungan masyarakat. Oleh sebab itu, politik uang menjadi salah satu cara instant yang digunakan caleg untuk meraih suara dalam pemilu.

Sebagai salah satu pilar demokrasi, partai politik dibentuk dengan mendasarkan diri pada sebuah ideologi yang diusungnya sehingga ideologi ini menjadi identitas partai atau pembeda antara partai satu dengan yang lain. Ideologi partai mestinya juga menjadi basis perjuangan atau cita-cita yang ingin dicapai satu partai politik (Romli, 2008). Seperti yang diungkapkan oleh De Swaan bahwa ideologi partai itu penting sebagai

dasar dalam pembentukan koalisi. Namun, dalam praktik pemilu di Indonesia pasca Orde Baru, koalisi partai yang terbentuk justru tak lagi soal ideologi namun lebih pada pragmatisme politik. Pragmatisme terjadi karena internalisasi ideologi parpol sangat lemah dan koalisi lebih bertujuan pragmatis daripada alasan kedekatan ideologi formal. Pragmatisme partai politik dalam membangun koalisi inilah yang disebut Riker sebagai koalisi office-seeking. Sebuah koalisi yang bertujuan untuk memaksimalkan kekuasaan tanpa memperhatikan ideologi yang diusung.

Mengamati kiprah partai politik di Indonesia pasca reformasi, terutama dalam membangun koalisi, bisa dikatakan partai tersebut membentuk sistem kepartaian yang mirip kartel (Ambardi, 2009). Salah satu ciri partai kartel yakni hilangnya peran ideologi partai yang idealnya merupakan dasar dari pembentukan sebuah koalisi. Kartelisasi ini pada akhirnya bisa terbentuk karena terkait kepentingan partai politik untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Kondisi ini berkaitan dengan sumber keuangan terutama yang berasal dari pemerintah, yang didapatkan partai melalui kegiatan perburuan rente (rent seeking). Kondisi rent seeking perburuan rente ini dapat terjadi karena partai politik memiliki akses dalam jabatan pemerintahan dan parlemen terutama jabatan menteri maupun jabatan komisi di parlemen (Ambardi, 2009).

Apa yang dilakukan partai politik di Indonesia di era reformasi dalam membangun koalisi dapat dilihat sebagai upaya mempertahankan kekuasaan dengan mendekati diri pada sumbernya yakni pemerintahan. Kondisi ini seperti yang dikatakan oleh Katz & Mair (1995) bahwa ketergantungan partai politik pada anggaran yang berasal dari pemerintah telah mengubah watak partai politik yang semakin jauh dari masyarakat dan semakin dekat dengan pemerintah (sumber kekuasaan). Banyak partai bergantung pada sumber dana yang sama,

perlahan mereka berkembang menjadi satu kelompok dengan kepentingan yang sama yakni mendapat dan mempertahankan sumber keuangan mereka. Fenomena politik kartel ini terjadi selain untuk memenuhi kebutuhan operasional partai, namun juga untuk kepentingan kampanye pada saat pemilu yang tidaklah murah.

SIMPULAN

Dua dekade reformasi nampaknya belum cukup bagi partai politik di Indonesia untuk bisa merubah watak politiknya. Idealnya, partai politik di Indonesia mestinya sudah terkonsolidasi dan menjalankan kebijakan partai berdasarkan ideologi yang dimiliki. Namun demikian, ideologi partai belum mampu mengalahkan pragmatisme partai politik. Hal ini tercermin dalam proses koalisi partai politik di Indonesia dari pemilu ke pemilu pasca Orde Baru.

Koalisi partai politik dalam mengusung capres dan cawapres merupakan suatu keniscayaan bagi negara dengan sistem multipartai, tak terkecuali di Indonesia. Perolehan suara pemilu legislatif pemilu pasca Orde Baru menggambarkan peta politik yang mengharuskan partai-partai melakukan koalisi dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden. Momen inilah menjadi arena perebutan kekuasaan politik.

Berdasarkan pengalaman pemilu 1999 hingga 2019, peta koalisi partai politik yang terbentuk mengalami perbedaan. Jika pada pemilu 1999, koalisi partai-partai Islam menjadi poros penting dalam menghadirkan calon presiden maka pada pemilu 2004 dan 2009 nampaknya partai Islam mengalami pergeseran kecenderungan pilihan koalisi yakni tidak lagi berbasis partai Islam namun justru mulai melirik untuk berkoalisi dengan partai nasionalis. Dalam konteks ini, pilihan koalisi tidak didasarkan pada kesamaan ideologi. Adapun pada pemilu 2014 dan 2019, pembentukan koalisi

partai-partai politik justru diwarnai dengan munculnya isu politisasi agama di masing-masing kubu capres.

Berdasarkan dinamika yang terjadi Dalam membangun koalisi, partai-partai politik di Indonesia dari pemilu ke pemilu era reformasi menunjukkan bahwa dalam membangun koalisi, partai-partai politik memiliki kecenderungan pragmatisme politik, di mana kebutuhan untuk memperoleh jabatan-jabatan politik seperti kursi menteri dan pimpinan di parlemen adalah tujuan partai. Pragmatisme inilah yang pada akhirnya menjadikan ideologi partai bukanlah faktor pengikat dalam membangun sebuah koalisi. Padahal, idealnya koalisi terbangun atas dasar kesamaan ideologi ataupun kesamaan kebijakan/program.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambardi, K. (2009). *Mengungkap Politik Kartel*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Azed, A.B, (2014). *Pilpres di Era Transisi Tahun 1999*. Diunduh di <http://www.jambiexpres.co.id/berita-18609-pilpres-di-era-transisi-tahun-1999.html>./tanggal 20 April 2019.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Budiatri, A.P. (2018). *Personalisasi Partai Politik di Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ekawati, E. (2015). "Koalisi Partai Islam di Indonesia pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014", *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, Vol.15, No.1.
- Fattah, E.S. (2000). *Zaman Kesempatan: Agenda Besar Demokratisasi Pasca Orde Baru*. Bandung: Mizan.
- Hasan, I.R, (2014). *Islam Dalam Pusaran Politik Pilpres 2014.* Diunduh dari <http://www.csrc.or.id/berita-278-islam-dalam-pusaran-politik-pilpres-2014.html>. tanggal 20 September 2014.
- Hakim, R.N, (2018). *Drama Penunjukan Sandiaga Uno Jadi Cawapres Prabowo*, Diunduh dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/10/08230561/drama-penunjukan-sandiaga-uno-jadi-cawapres-prabowo?page=3>. Tanggal 25 Agustus 2018.
- Katz, R.S. & Mair, P. (1995). *Changing Models of Party Organization and Party Democracy*:

- The Emergence of the Cartel Party. London: Sage Publication, Vol. 1. No.1.
- Mujani, S. Liddle, W, & Ambardhi, K. (2011). *Kuasa Rakyat*. Jakarta: Mizan.
- Noer, D, (et all). (1999). *Mengapa Partai Islam Kalah? Perjalanan Politik Islam dari Pra-Pemilu 1999 sampai Pemilihan Presiden*, Jakarta: ALVABET.
- Neuwman, W.L. (2003). *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approaches*, 5th ed. Boston: Allyn and Bacon.
- Redaksi, (2001). "DPP PAN Menolak Kompromi Politik", Diunduh dari https://www.liputan6.com/news/read/10509/dpp-pan-menolak-kompromi-politik?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.co.id%2F, tanggal 12 Agustus 2019.
- Romli, L. (2008). *Masalah Kelembagaan Partai Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru*, Jurnal Penelitian Politik LIPI, Vol. 5, No. 1.
- Sartori, G.R. (2005). *Parties and Party Systems: a Framework for Analysis*. UK: ECPR Press.
- Strom, K. (1990). "A Behavioral Theory of Competitive Political Parties". *American Journal of Political Science*, Volume 34.
- Tim Litbang Kompas. (2004). *Partai-partai Politik di Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*.
- Pusat Penelitian Politik Year Book 2004. (2004). *Quo Vadis Politik Indonesia*. Jakarta: LIPI press.
- Rahmah, G, (2017). *Pengamat: SBY-Prabowo Bertemu, Peta Politik Mengulangi 2014*, Diunduh di [https://nasional.tempo.co/read/895104/pengamat-sby-prabowo-bertemu-peta-politik-mengulangi-2014/tanggal 12 Maret 2018](https://nasional.tempo.co/read/895104/pengamat-sby-prabowo-bertemu-peta-politik-mengulangi-2014/tanggal%2012%20Maret%202018).
- Wardani. S.B.E. (2007). *Koalisi Parpol dalam Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung kasus Pilkada Provinsi Banten tahun 2006*. Jakarta: Tesis UI.
- Widiastuti, R, (2018). *Detik-detik sebelum Jokowi Umumkan Ma'ruf Amin Jadi Cawapres*". Diunduh dari <https://nasional.tempo.co/read/1115647/detik-detik-sebelum-jokowi-umumkan-maruf-amin-jadi-cawapres>. tanggal 25 Agustus 2018.
- Yuda, H. (2010). *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.